

## **KONSEP DAN AKIBAT HUKUM PENYITAAN SAHAM OLEH HAKIM PADA PT TERTUTUP**

Oleh  
**Ibnu Setyo Hastomo<sup>1</sup> dan Sulistiowati<sup>2</sup>**

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji konsep penyitaan saham pada PT Tertutup, konsistensi penerapan ketentuan Poin Y angka 11 Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum terhadap penyitaan saham oleh Hakim, serta mengetahui dan mengkaji akibat hukum atas penyitaan saham pada PT Tertutup oleh Hakim, terhadap Perseroan, Pemegang Saham, maupun Pihak Ketiga Lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dan didukung oleh wawancara dengan Narasumber dan Responden. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, konsep penyitaan saham pada PT Tertutup adalah Saham sebagai Benda dapat disita sebagai jaminan pelaksanaan Putusan Pengadilan. Kedua, Konsistensi penerapan ketentuan Poin Y Angka 11 Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum terhadap penyitaan saham oleh Hakim pada PT Tertutup adalah terdapat Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*) yang melakukan penyitaan saham pada PT Tertutup. Putusan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, dikarenakan saham yang disita bukanlah saham pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Larangan penyitaan saham sebagaimana diatur pada ketentuan Poin Y angka 11 Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum adalah saham milik Negara atau Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Ketiga, akibat hukum atas penyitaan saham pada PT Tertutup terhadap Perseroan, Pemegang Saham, maupun Pihak Ketiga lainnya adalah saham tersebut tidak dapat dialihkan, diagunkan, dan atau digadaikan kepada pihak manapun.

**Kata Kunci : Saham, Penyitaan, PT Tertutup**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S-2 Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta (setyoibnu24@gmail.com).

<sup>2</sup> Dosen Program S-2 Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada.

## **LEGAL CONCEPT AND CONSEQUENCE OF SHARE SEIZURE BY JUDGES AT PRIVATE COMPANIES**

### **ABSTRACT**

By  
*Ibnu Setyo Hastomo<sup>3</sup> and Sulistiowati<sup>4</sup>*

*This research aims to determine and examine the concept of share seizure in private companies, the consistency in the application of the provisions of Point Y number 11 Book II of the Supreme Court of the Republic of Indonesia regarding General Civil Administration and Technical Guidelines for share seizure by judges, as well as knowing and researching the legal consequences of share seizure in private companies by Judges, against the Company, Shareholders, and Other Third Parties.*

*This research is an empirical normative research which is descriptive analytical in nature. The data used is secondary data consisting of primary and secondary legal materials, and supported by interviews with informants and respondents. The data is then analyzed qualitatively and the results are presented descriptively.*

*The results showed, first, the concept of share seizure in private company means shares as objects can be seized as collateral for the implementation of court decisions. Second, the consistency of the application of the provisions of Point Y Number 11 Book II of the Supreme Court of the Republic of Indonesia regarding Administrative and Technical Guidelines for General Civil Courts against share seizure by Judges at Private companies is that there is a Court Decision with Permanent Legal Strength (*Inkracht van gewijsde*) which confiscates shares in PT Closed. This verdict can be legally justified, because the shares seized were not shares in a state-owned or regional-owned company. The prohibition of share seizure as stipulated in the provisions of Point Y number 11 Book II of the Supreme Court of the Republic of Indonesia concerning General Civil Administration and Technical Technical Guidelines are shares owned by the State or Regional Government in State-owned Enterprises or Provincially-owned Corporation.*

*Third, the legal consequence of share seizure in private company against the Company, Shareholders, or other Third Parties is that the shares cannot be transferred, pledged as collateral and or as pledged to any party.*

**Keywords : Shares, Seizure, Private company**

---

<sup>3</sup>Student of Master's Program in Business Law, Gadjah Mada University, Jakarta Campus (setyoibnu24@gmail.com ).

<sup>4</sup> Lecturer in Master of Business Law Program, Gadjah Mada University.